

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, 1999, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: LPPM-UNISBA.
- Bambang Waluyo, 2018, *Penegakan Hukum di Indonesia: Masalah dan Prospek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Edisi I, Jakarta: Kencana.
- _____, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bismar Siregar, 1989, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gautama Rahardjo, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hadi Budi Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: PT. Grasindo.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Bandung: Mandar Maju.
- _____, 2013, *Putusan Hakim dan Problematikanya*, Bandung: Mandar Maju.

- _____, 2014, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. H. Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco.
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi, 1995, *Kebijakan Kriminal*, Bandung: Alumni.
- Muladi, Barda Nawawi, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Rudolf S. O. Manurung, 2020. *Hukum Narkotika di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Saefullah Wiradipraja, 2015, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung: CV. Keni Media.
- Satjipto Raharjo, 2009, *Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cetakan ke V, Bandung: Alumni.
- _____, 2018, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Semarang: Yayasan Sudarto.
- Yusti Probowati Rahayu, 2005, *Di Balik Putusan Hakim: Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Sidoarjo: Citra Media.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. Jurnal

- Agus Santoso. 2023. *Faktor Sosial Ekonomi dan Penggunaan Narkotika*. Jurnal Ekonomi dan Masyarakat, Vol. 12, No. 1.
- Anjasmara Agus Nyoman Raka, Putra, et al., 2020, *Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2, No. 2.
- Bambang Waluyo, 2018, *Pengaruh Opini Publik terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Kriminal*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 9, No. 1.
- Budi Santoso, 2023, *Dampak Lingkungan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkotika*. Jurnal Pendidikan dan Sosial, Vol. 7, No. 2.
- Diana Larasati, 2023, *Peran Lingkungan Sosial dalam Penyalahgunaan Narkotika*. Jurnal Sosiologi dan Perilaku, Vol. 11, No. 3.
- Eva Dewi, 2019, *Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Pranata Hukum, Vol.5, No. 2.
- Fenny Susanti, 2021, *Faktor Psikologis dalam Penyalahgunaan Narkotika*. Jurnal Psikologi Klinis, Vol. 5, No. 2.
- Frengky Manurung dkk., 2021, *Disparitas Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat*, Law Journal Dharmawangsa, Vol. II, No. 1.
- Harjono Widodo, 2021, *Pengaruh Disparitas Putusan terhadap Tingkat Recidivism dalam Kasus Pidana Narkotika*. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 8, No. 3.
- Harjono, 2017, *Disparitas Putusan dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6, No. 2.
- Hendra Satrio Prasetyo, 2023, *Ketidakseragaman Putusan dalam Tindak Pidana Narkotika: Analisis Hukum dan Praktik Peradilan*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 12, No. 2.
- Niken Pratiwi. 2022. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 9, No. 1.

- Rani Putri. 2022. *Ketergantungan Narkotika dan Akibatnya bagi Individu*. Jurnal Kesehatan Mental, Vol. 6, No. 1.
- Sari Utami, 2021, *Fungsi Putusan Hakim dalam Sistem Peradilan*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 11, No. 2.
- Siti Nuraini, 2022, *Kebijakan Rehabilitasi untuk Pengguna Narkotika: Tantangan dan Harapan*. Jurnal Kebijakan Sosial, Vol. 10, No. 2.
- Siti Rahma, 2022, *Peran Keluarga dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika*. Jurnal Psikologi Keluarga, Vol. 4, No. 1.
- Wiranarta Sari, 2022, *Disparitas Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 898/Pid.Sus/2020/PN.Pdg Dan Putusan Nomor: 940/Pid.Sus/2020/PN.Pdg)*. Jurnal Swara Justisia UNES Padang, Vol. 6, No. 1.

D. Putusan

- Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN.Pdp.
- Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 80/Pid.Sus/2023/PN.Pdp.

E. Disertasi

- Sahuri Lasmadi, 2003, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

F. Artikel dalam Karya Ilmiah/Seminar/Simposium.

- Andi Hamzah, “Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman”, Makalah Disampaikan pada: Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penagakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Denpasar, Tanggal 14-18 Juli 2003.